JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 1, 2025

IMPLEMENTASI PROGRAM IWAK KARING BETANAK (INTRODUKSI PUSTAKAWAN DAN TENAGA PERPUSTAKAAN BERKELILING MENJADI SAHABAT ANAK) DI KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN (STUDI KASUS SDN PULAU KEMBANG DAN SDN PUTAT BASIUN)

Muhammad Faisal Hafiz[1], Arif Budiman[2], Muhamad Arsyad[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: hafizfaisal57448@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Program Iwak Karing Betanak (Introduksi Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan Berkeliling Menjadi Sahabat Anak) di Kecamatan Awayan, khususnya di SDN Pulau Kembang dan SDN Putat Basiun, menghadapi tantangan seperti keterbatasan koleksi buku, frekuensi kunjungan, dan jumlah pustakawan yang tidak memadai. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa program sudah cukup baik berdasarkan beberapa indikator, seperti komunikasi, koordinasi, kerjasama, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran, SOP, pelaksanaan jadwal, serta ketersediaan unit pelaksana, meskipun ketersediaan informasi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Faktor pendukung program ini meliputi kerjasama antarsekolah dan sarana prasarana, sementara hambatan utama adalah akses geografis yang sulit, cuaca buruk, kekurangan staf, dan koleksi buku yang belum memadai. Untuk mengoptimalkan program ini, disarankan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meningkatkan koleksi buku, menambah kendaraan operasional, memperbanyak jadwal kunjungan, dan mendorong kerjasama lebih aktif antara sekolah dan perpustakaan guna meningkatkan literasi siswa.

Kata Kunci : Implementasi, Program Iwak Karing Betanak

ABSTRACT

The Implementation of the Iwak Karing Betanak Program (Introduction of Mobile Librarians and Library Staff as Children's Friends) in Awayan District, particularly at SDN Pulau Kembang and SDN Putat Basiun, faces several challenges, including limited book collections, low visit frequency, and insufficient number of librarians. This descriptive qualitative research revealed that the program has been implemented quite effectively based on several indicators, such as communication, coordination, collaboration, facilities and infrastructure, human resources, budget, SOP adherence, schedule execution, and the availability of implementing units, although the availability of information still requires further development. The supporting factors of this program include inter-school cooperation and existing facilities and infrastructure, while the main obstacles are difficult geographical access, adverse weather conditions, staff shortages, and inadequate book collections. To optimize this program, it is recommended that the Library and Archives Office increase the book collection, provide more operational vehicles, expand the visitation schedule, and encourage more active collaboration between schools and libraries to enhance students' literacy.

Keywords: *Implementation, Iwak Karing Betanak Program*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun suatu bangsa, menjadi dasar untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Di era globalisasi saat ini, tantangan untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu semakin rumit, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Tingkat kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada keberadaan fasilitas dan tenaga pendidik, tetapi juga pada kemampuan literasi masyarakat. Terbatasnya akses terhadap buku dan bahan bacaan yang bermutu sering menjadi kendala bagi anak-anak di wilayah terpencil untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.

Kabupaten Balangan, salah satu daerah di Kalimantan Selatan, memahami betul pentingnya meningkatkan mutu pendidikan dan literasi, terutama di wilayah yang belum terlayani dengan baik. Dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam, anak-anak di daerah terpencil sering

menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengatasi hal ini dengan melaksanakan berbagai inisiatif, termasuk meluncurkan program-program inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah mengeluarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong implementasi inovasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, guna mengatasi tantangan dalam pengembangan pendidikan di daerah terpencil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan dan literasi anak-anak, sekaligus memperbaiki kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Balangan.

Sebagai bagian dari peraturan tersebut, Program Iwak Karing Betanak (Introduksi Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan Berkeliling Menjadi Sahabat Anak) diperkenalkan untuk meningkatkan literasi di kalangan anak-anak, khususnya di wilayah pedesaan yang sulit terjangkau. Program ini bertujuan menyediakan akses mudah terhadap bahan bacaan berkualitas sekaligus memperkenalkan dunia literasi melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan. Dengan cara ini, program tersebut berupaya menumbuhkan minat baca sejak dini untuk membangun kebiasaan literasi yang berkelanjutan.

Kecamatan Awayan, salah satu wilayah dengan tantangan pendidikan yang cukup besar, menjadi fokus penerapan Program Iwak Karing Betanak. Dua sekolah dasar, yaitu SDN Pulau Kembang dan SDN Putat Basiun, dipilih sebagai studi kasus. Kedua sekolah tersebut mencerminkan permasalahan umum di wilayah pedesaan yang terbatas dalam akses terhadap perpustakaan dan bahan bacaan. Keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi rendahnya minat baca, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif dan sosial anak-anak.

Program Iwak Karing Betanak melibatkan pustakawan dan tenaga perpustakaan yang secara rutin mengunjungi sekolah-sekolah untuk menyediakan akses ke berbagai koleksi buku bagi anak-anak. Keberadaan pustakawan keliling ini bukan hanya tentang mendistribusikan buku, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang menarik. Dalam setiap kunjungannya, pustakawan menyelenggarakan berbagai aktivitas, seperti membaca bersama, lomba bercerita, hingga diskusi buku, yang dirancang untuk meningkatkan minat baca dan mendorong kreativitas anak. Dengan pendekatan ini, literasi tidak lagi dianggap hanya sebagai kewajiban akademis, tetapi menjadi kegiatan yang menyenangkan dan inspiratif.

Program ini juga melibatkan dukungan aktif dari orang tua dan masyarakat setempat. Melalui sesi sosialisasi dan pertemuan, orang tua diajak untuk mendukung kegiatan literasi anak-anak di rumah. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan literasi yang mendukung, di mana anak merasa lebih termotivasi untuk membaca dan belajar. Dengan keterlibatan keluarga, diharapkan anak-anak dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka melalui eksplorasi dunia bacaan.

Pelaksanaan Program Iwak Karing Betanak di SDN Pulau Kembang dan SDN Putat Basiun juga menunjukkan bahwa kegiatan literasi dapat melampaui pengajaran formal di dalam kelas. Program ini menyoroti pentingnya pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik anak di daerah tersebut. Dengan mengadaptasi metode pembelajaran yang sesuai, program ini bertujuan menghadirkan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi anak-anak.

Program Iwak Karing Betanak diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional dalam meningkatkan tingkat literasi di Indonesia. Dalam hal ini, program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan siap bersaing di tingkat global. Masyarakat yang melek literasi tidak hanya mampu mengakses informasi dengan lebih baik, tetapi juga dapat berpikir kritis, berinovasi, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Dari perspektif jangka panjang, kesuksesan Program Iwak Karing Betanak bisa menjadi model bagi program inovatif lainnya di bidang pendidikan. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Balangan dan partisipasi semua pihak, program ini diharapkan terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan literasi dan pendidikan

di kabupaten tersebut. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, sekolah, pustakawan, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Secara keseluruhan, Program Iwak Karing Betanak bukan hanya bertujuan meningkatkan akses terhadap buku dan literasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun dasar yang kokoh bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Balangan. Dengan mengedepankan prinsip inovasi dan kolaborasi, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga semua anak di daerah ini memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita mereka. Peneliti memulai proses penyusunan skripsi ini dengan melakukan observasi awal sebagai langkah pertama.

Fenomena permasalahan terkait dengan implementasi Program Iwak Karing Betanak (Introduksi Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan Berkeliling Menjadi Sahabat Anak) di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, khususnya di SDN Pulau Kembang dan SDN Putat Basiun, meliputi beberapa isu utama berikut:

1. Keterbatasan koleksi buku menjadi masalah utama dalam program ini. Dampaknya, terbatasnya pilihan bacaan bagi anak-anak menghambat minat baca mereka. Keterbatasan variasi buku menyulitkan pengembangan minat baca di kalangan siswa, terutama bagi mereka yang memiliki minat yang berbeda atau kemampuan membaca yang bervariasi. Seharusnya, dengan koleksi buku yang lebih beragam, program ini dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan literasi siswa. (Sumber: Rekap Buku Pusling)
2. Frekuensi dan durasi kunjungan pustakawan yang terbatas juga menjadi kendala. Program ini hanya dijalankan sekali sebulan di setiap sekolah dengan waktu pelaksanaan yang singkat, sekitar satu jam. Hal ini mengurangi kesempatan siswa untuk berinteraksi lebih banyak dengan pustakawan dan materi bacaan yang ada, sehingga mengurangi dampak dalam meningkatkan minat baca dan literasi siswa secara berkelanjutan. (Sumber: Jadwal Kunjungan Pustakawan Iwak Karing Betanak)
3. Keterbatasan jumlah pustakawan yang terlibat dalam pelaksanaan program juga memengaruhi efektivitasnya. Hanya empat pustakawan yang menangani program di seluruh wilayah Kecamatan Awayan, termasuk SDN Pulau Kembang dan SDN Putat Basiun. Meskipun mereka bekerja maksimal, jumlah yang terbatas menjadi tantangan besar dalam mencapai tujuan program dengan optimal. Dengan cakupan wilayah yang luas, pustakawan harus bekerja dengan jadwal yang padat, yang mengakibatkan kegiatan literasi menjadi terhambat akibat frekuensi kunjungan yang tidak ideal. (Sumber: Data Pegawai Dinas Perpustakaan Balangan)

Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan keputusan atau rencana program yang dibuat oleh pihak pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fredrich dalam Agustino (Marwiyah, 2022:12) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi tertentu untuk mengatasi hambatan atau memanfaatkan peluang yang ada. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (Marwiyah, 2022:12) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do). Sementara itu, Anderson dalam Agustino (Marwiyah, 2022:12) menggambarkan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, dilakukan oleh individu atau kelompok aktor, dan terkait dengan isu yang sedang dihadapi.

Menurut Abdul Wahab (Marwiyah, 2022:12), kebijakan publik adalah tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu, disertai sanksi, dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang saling terkait serta berdampak pada masyarakat luas. Tachjan dalam (Kusuma Dewi, 2022:1) menyatakan bahwa substansi kebijakan adalah hasil dari kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan yang saling berhubungan, yang dilakukan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik lahir karena adanya kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Fungsi kebijakan ini berorientasi pada kepentingan

publik yang dirumuskan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kusuma Dewi (2022:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan saling terkait yang diambil oleh lembaga atau pejabat pemerintah.

Kebijakan publik mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas publik, bersifat mengikat banyak orang, dan bertujuan melanjutkan suatu tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam negara modern, kebijakan publik berfokus pada pelayanan publik, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kebijakan publik juga harus mampu menyatukan kepentingan yang berbeda untuk mencapai prioritas yang lebih luas dan mendesak dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Anggara (dalam Kusuma Dewi, 2022:1), kebijakan merupakan suatu konsep yang mencakup beberapa aspek berikut ini:

1. Ketetapan: Kebijakan mencakup ketentuan atau aturan-aturan yang memiliki sifat mengikat dan berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.
2. Maksud: Kebijakan dirancang dengan tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai hasil yang diinginkan serta mengatasi berbagai masalah yang timbul.
3. Keputusan: Kebijakan mencakup pilihan yang dapat dijalankan atau tidak, tergantung pada kepentingan yang hendak dicapai atau kondisi tertentu.
4. Proses Pelaksanaan: Kebijakan melibatkan pelaksanaan berbagai hal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai bagian dari usaha untuk merealisasikan tujuan dan fungsi kebijakan tersebut.

Van Metter dan Van Horn (dalam Affrian, 2023:46) berpendapat bahwa perbedaan dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik dari kebijakan itu sendiri. Mereka mengajukan pendekatan untuk menghubungkan isu-isu kebijakan dengan implementasinya melalui model konseptual yang mengaitkan kebijakan dengan hasil kerja (performance). Dalam teori ini, tiga konsep penting yang mereka tekankan dalam prosedur implementasi adalah perubahan, pengendalian, dan kepatuhan.

Beberapa hal yang perlu dikaji meliputi:

1. Hambatan dalam memperkenalkan perubahan di suatu organisasi.
2. Tingkat efektivitas mekanisme pengendalian pada setiap jenjang struktur, yang berkaitan dengan kewenangan pihak dengan posisi terendah dalam organisasi.
3. Tingkat keterikatan individu dalam organisasi, terkait masalah kepatuhan.

Tahapan yang menghubungkan antara kebijakan dan hasil kerja dipengaruhi oleh sejumlah variabel independen yang saling berinteraksi, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Seberapa besar kebijakan itu dirancang dan tujuannya.
2. Sumber Daya Kebijakan: Ketersediaan sumber daya untuk mendukung implementasi
3. Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana: Termasuk struktur dan fungsi institusional.
4. Komunikasi Antarorganisasi: Hubungan kerja dan koordinasi antarorganisasi yang terkait.
5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik: Lingkungan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Variabel kebijakan mencakup tujuan yang telah ditetapkan serta sumber daya yang tersedia. Fokus utamanya terletak pada badan pelaksana, baik formal maupun informal, dengan penekanan pada bagaimana komunikasi antarorganisasi mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Komunikasi ini mencakup interaksi antara sistem politik dengan kelompok sasaran. Di sisi lain, sikap pelaksana menjadi perhatian khusus, terutama terkait orientasi mereka dalam menjalankan program di lapangan.

Dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980), Edwards menjelaskan beberapa pendekatan terkait studi implementasi kebijakan. Pendekatan ini mencakup studi kasus (Case Study Approach) oleh Merilee S. Grindle, analisis keputusan oleh Graham Allison dalam bukunya *Essence of Decision* (1971), serta perspektif yang dikembangkan oleh Donald Van Horn, Paul Sabatier, dan Daniel Mazmanian. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, George C. Edwards III mengajukan dua pertanyaan utama:

1. Apa saja prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan?
2. Apa hambatan utama yang menghalangi keberhasilan tersebut?

Berdasarkan analisisnya, George C. Edwards III (dalam Affrian, 2023:38) merumuskan empat faktor utama yang menjadi syarat keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi: Penyampaian kebijakan yang jelas dan konsisten.
2. Sumber Daya: Ketersediaan tenaga kerja, dana, dan fasilitas yang memadai.
3. Sikap Birokrasi dan Pelaksana: Komitmen, dukungan, dan respon positif dari pelaksana.
4. Struktur Organisasi dan Tata Aliran Kerja: Desain struktur yang mendukung efektivitas pelaksanaan.

Inovasi merujuk pada kebaruan yang dapat diterapkan dalam konteks individu, organisasi, masyarakat, atau situasi tertentu (Prabowo, 2022:19). Inovasi melibatkan pengembangan dan penerapan sesuatu yang baru, meskipun hal baru ini tidak harus sepenuhnya orisinal melainkan dapat berupa hasil kombinasi dari elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya. Konsep kebaruan mencakup dimensi ruang dan waktu. Dari segi ruang, sesuatu dapat dianggap baru di suatu tempat tetapi tidak di tempat lain. Meskipun demikian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memperkecil dimensi jarak ini, sehingga penemuan baru dapat segera dikenal secara global. Dari segi waktu, kebaruan merujuk pada relevansi suatu inovasi dengan zamannya. Bahkan, produk atau jasa yang baru dikenal oleh pasar dapat digolongkan sebagai kebaruan jika membawa perubahan yang signifikan.

Pendapat lain menekankan bahwa inovasi tidak hanya mencakup penemuan baru, tetapi juga adopsi dan adaptasi dari ide-ide atau proses yang telah dikembangkan sebelumnya (Prabowo, 2022:20). Inovasi mencerminkan penerapan pengetahuan baru yang mencakup perubahan produk, proses, atau layanan yang membawa manfaat nyata. Urabe et al. (2022:20) menekankan bahwa inovasi mencakup pembentukan ide baru hingga penerapan ide tersebut melalui proses yang panjang dan bertahap di dalam organisasi. Proses ini melibatkan sejumlah keputusan yang bertujuan untuk mengubah ide menjadi sesuatu yang dapat diterapkan atau dipasarkan.

Beberapa penulis, seperti Thompson (1965), membedakan antara penemuan dan inovasi. Penemuan merujuk pada generasi ide baru, sementara inovasi adalah adopsi atau implementasi ide tersebut hingga menjadi produk atau layanan nyata (Godin, 2022; Knight, 2022; Osborne, 2022:20). Dengan demikian, inovasi dapat mencakup penggunaan awal atau penyebaran pengetahuan baru, yang diadaptasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan situasi atau konteks tertentu.

Inovasi secara global merupakan kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Di sektor swasta, inovasi berkembang melalui proses kreatif yang digerakkan oleh semangat kewirausahaan. Sementara itu, penerapan tindakan kewirausahaan di sektor publik sering kali kurang terdefinisi dengan jelas. Meskipun demikian, sektor publik, meskipun memiliki struktur kelembagaan yang berbeda dari sektor swasta, tetap dapat memanfaatkan dorongan kewirausahaan sebagai alat untuk menciptakan inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam praktiknya, sektor swasta telah memperkenalkan prinsip “berinovasi atau mati,” yang mendorong mereka keluar dari berbagai hambatan terhadap inovasi. Sebaliknya, sektor publik sering kali memandang inovasi sebagai pilihan opsional, tanpa tekanan yang signifikan. Meskipun lembaga publik mungkin tidak “mati” tanpa inovasi, kegagalan untuk berinovasi dapat menyebabkan menurunnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Oleh karena itu, inovasi di sektor publik harus menjadi fokus utama untuk mempertahankan kepercayaan dan efektivitas.

Inovasi adalah penerapan sengaja gagasan, produk, atau prosedur baru yang dirancang untuk membawa manfaat kepada individu, kelompok, atau organisasi. Suatu inovasi dianggap signifikan jika memiliki keunggulan relatif, kompatibilitas dengan kondisi yang ada, tingkat kompleksitas yang dapat dikelola, kemampuan untuk diuji coba, serta mudah diamati dan diukur hasilnya.

Menurut Arnold & Thuriaux (Prabowo, 2022:31), inovasi nasional mencakup aktor dan aktivitas dalam perekonomian yang mendorong inovasi industri dan komersial untuk mendukung

pembangunan ekonomi. Di Indonesia, inovasi nasional harus berakar pada nilai-nilai bangsa, patuh pada hukum yang berlaku, efisien dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memaksimalkan peran sumber daya manusia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga keamanan nasional, serta mengangkat martabat dan keutuhan negara.

Lakitan (2022:31) menegaskan bahwa penguatan inovasi nasional sangat penting untuk membangun kecerdasan bangsa, memperkuat daya saing ekonomi nasional, menyelaraskan kehidupan sosial budaya, dan memastikan ketahanan negara. Strategi yang diusulkan termasuk sinkronisasi antara teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan riil masyarakat, tantangan industri, serta prioritas pembangunan nasional.

Inovasi dan kebijakan di sektor publik merupakan dua hal yang saling melengkapi. Inovasi berfungsi sebagai pembaruan yang menggantikan metode lama, sementara kebijakan pada dasarnya juga berfungsi sebagai instrumen pembaruan. Dengan demikian, kebijakan idealnya harus mengandung elemen inovasi yang mampu memberikan perubahan positif. Sebaliknya, kebijakan yang tidak membawa pembaruan hanya akan menjadi instrumen administratif yang kurang fungsional.

Dalam interaksi antara inovasi dan kebijakan, terdapat tiga bentuk hubungan utama:

1. Policy Innovation (Inovasi Kebijakan)

   Policy innovation merujuk pada adanya inisiatif dan arahan kebijakan baru. Hal ini berarti setiap kebijakan publik yang dirumuskan seharusnya membawa sesuatu yang baru. Walker (Tyran & Sausgruber, 2003:4) mendefinisikan inovasi kebijakan sebagai kebijakan yang baru bagi negara yang menerapkannya, tanpa memedulikan usia program tersebut atau seberapa banyak negara lain telah mengadopsinya.
2. Innovations in the Policy-Making Process (Inovasi dalam Proses Perumusan Kebijakan)

   Jenis inovasi ini berfokus pada peningkatan proses pembuatan atau perumusan kebijakan itu sendiri. Misalnya, perumusan kebijakan yang sebelumnya kurang melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan, kini mengintegrasikan mekanisme partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang SPPN yang mengamanatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.
3. Policy to Foster Innovation and Its Diffusion (Kebijakan untuk Mendorong dan Menyebarkan Inovasi)

   Kebijakan ini bertujuan menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi ke berbagai sektor. Berry & Berry menjelaskan bahwa penyebaran inovasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama:
   a. Internal Determinants (Determinasi Internal): Karakteristik sosial, ekonomi, dan politik suatu negara yang menentukan tingkat inovasi yang mampu dihasilkan.
   b. Regional Diffusion (Difusi Regional): Kemungkinan adopsi kebijakan tertentu meningkat jika negara-negara di sekitarnya telah menerapkan kebijakan serupa.

Program Iwak Karing Betanak (Introduksi Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan Berkeliling Menjadi Sahabat Anak) merupakan sebuah inovasi di bidang pendidikan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah. Fokus utama dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi anak-anak, terutama mereka yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil, melalui kehadiran pustakawan dan tenaga perpustakaan yang aktif mengunjungi sekolah-sekolah.

Dalam pelaksanaannya, pustakawan berperan sebagai pendamping anak yang tidak hanya membawa koleksi bahan bacaan berkualitas tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Kegiatan yang dilakukan meliputi membaca bersama, diskusi buku, hingga lomba bercerita, dengan tujuan menumbuhkan minat baca dan mendorong kebiasaan literasi sejak dini.

Program ini hadir untuk menjembatani keterbatasan akses bahan bacaan yang sering kali dialami anak-anak di daerah terpencil. Melalui pendekatan langsung dan interaktif, program ini

dirancang untuk membawa dampak positif pada perkembangan literasi anak-anak, sekaligus memupuk minat belajar yang lebih luas.

Sebagai landasan hukum, Peraturan Bupati memberikan panduan dan dukungan bagi pelaksanaan program ini agar berjalan secara terstruktur, berkesinambungan, dan mampu melibatkan berbagai pihak terkait dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan literasi di wilayah Kabupaten Balangan.

METODE

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan membangun pemahaman berdasarkan perspektif konstruktif, partisipatif, atau keduanya. Dalam penelitian ini, pengetahuan dikembangkan melalui interpretasi peneliti terhadap berbagai perspektif dan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data dapat berupa catatan observasi, wawancara, pengalaman individu, atau sejarah, yang mendukung terbentuknya interpretasi tersebut.

Menurut Moleong (dalam Murdiyanto, 2022:19), penelitian kualitatif diartikan sebagai studi yang berfokus pada memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, motivasi, atau pandangan individu. Pemahaman ini dilakukan secara menyeluruh melalui deskripsi berbasis kata-kata dalam konteks alami yang spesifik, dengan memanfaatkan metode ilmiah yang relevan.

Saryono (dalam Nasution, 2023:34) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, atau menjelaskan karakteristik sosial yang sulit dikuantifikasi atau dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan metode kuantitatif adalah bahwa penelitian kualitatif memulai proses dari data, menggunakan teori yang ada sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pengembangan teori baru. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan analisis induktif, dan biasanya digunakan untuk mengkaji individu, fenomena, simbol-simbol, dokumen, atau gejala sosial.

Penelitian deskriptif, salah satu jenis penelitian kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang populasi, situasi, atau fenomena secara sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti "apa," "di mana," "kapan," dan "bagaimana," tetapi tidak untuk menjelaskan alasan di balik fenomena (Rita Fiantika dkk., 2022:88). Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak memanipulasi atau mengontrol variabel melainkan hanya melakukan pengamatan dan pengukuran.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

   Komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena dapat memastikan bahwa tujuan, prosedur, dan tanggung jawab disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan konsisten sangat penting untuk mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

   a. Komunikasi

      Komunikasi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang ada dalam setiap fase kehidupan dan terkandung dalam semua budaya manusia. Komunikasi juga berperan penting dalam semua disiplin ilmu, baik itu ilmu agama, filsafat, sosial humaniora, sains, teknologi, dan lain sebagainya. Intinya, komunikasi adalah sebuah interaksi yang melibatkan proses pembentukan makna. Makna yang dibentuk bisa berbeda-beda karena tergantung pada persepsi individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jika terdapat perbedaan makna, maka itu menandakan bahwa komunikasi tersebut kurang efektif. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah strategis untuk menyamakan pemahaman dan memastikan pesan serta informasi dapat diterima dengan cara yang seragam.

      Komunikasi manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda. Beragamnya perbedaan dalam adat, pandangan hidup, pendidikan, jenis kelamin, pola asuh,

lingkungan sosial, dan lain-lain, memengaruhi cara komunikasi masing-masing individu.

Wawancara menunjukkan bahwa komunikasi, khususnya sebelum kunjungan ke sekolah, dilakukan dengan efektif menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini menegaskan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori Implementasi menurut George C. Edwards III, dengan komunikasi yang berlangsung lancar di antara kedua belah pihak.

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program, karena keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik. Koordinasi ini mencakup upaya penyelarasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tujuan utama dari koordinasi adalah untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan program, sehingga semua pihak dapat berkontribusi secara efektif tanpa adanya tumpang tindih tugas.

Koordinasi yang efektif melibatkan pembagian tugas yang jelas dan adanya sistem komunikasi yang memadai di antara pihak-pihak terkait. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, setiap pihak memahami peran mereka, yang pada gilirannya mengurangi potensi terjadinya kebingungan atau konflik. Selain itu, koordinasi juga menyangkut penyelesaian masalah bersama, di mana berbagai pihak bekerja sama untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama implementasi program.

Keberhasilan koordinasi dapat sangat dipengaruhi oleh mekanisme yang ada, seperti rapat koordinasi, forum diskusi, atau penggunaan sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan pihak terkait berbagi informasi secara efisien dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan program. Koordinasi yang baik membutuhkan komitmen bersama untuk lebih mengutamakan tujuan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Kurangnya koordinasi dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, koordinasi yang solid merupakan landasan bagi keberhasilan suatu program.

Koordinasi antara pihak SD dan Dinas Perpustakaan sudah berjalan dengan baik melalui komunikasi dan surat-menyurat, yang sesuai dengan teori Implementasi menurut George C. Edwards III, di mana koordinasi antara Dinas Perpustakaan dengan SDN Putat Basiun dan SDN Pulau Kembang sudah terjalin dengan efektif.

c. Kerja Sama

Kerja sama dalam pelaksanaan kebijakan sangat menentukan keberhasilan program. Kerja sama ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga terkait, untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab dibagi dengan cara yang seimbang. Keberhasilan kerja sama dipengaruhi oleh beberapa elemen, seperti kejelasan tugas, komunikasi yang efektif, komitmen bersama, serta transparansi yang menciptakan rasa saling percaya.

Proses kerja sama dimulai dari perencanaan bersama untuk menyelaraskan tujuan, diikuti oleh koordinasi untuk menyinkronkan aktivitas dan sumber daya, pelaksanaan berdasarkan peran masing-masing pihak, dan akhirnya evaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut terlaksana. Misalnya, dalam kebijakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kabupaten Balangan, kolaborasi melibatkan Dinas Kesehatan sebagai pelaksana utama, pemerintah daerah yang menyediakan anggaran, lembaga pendidikan yang mengidentifikasi penerima manfaat, relawan dalam distribusi, serta organisasi non-profit dalam penyuluhan atau donasi. Kerja sama yang baik akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan, menghemat sumber daya, mempercepat pencapaian tujuan, serta melibatkan masyarakat lebih banyak, sehingga kebijakan tersebut lebih diterima dan

membawa dampak positif yang maksimal.

Kolaborasi yang baik juga terlihat dalam kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan SDN Putat Basiun serta SDN Pulau Kembang, yang telah berfungsi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kerja sama dalam teori Implementasi George C. Edwards III telah diterapkan dengan efektif antara pihak Dinas Perpustakaan dan sekolah-sekolah tersebut.

Sumber daya merujuk pada segala elemen yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, baik dari aspek tenaga kerja, anggaran, maupun teknologi yang digunakan. Faktor-faktor ini menjadi kunci untuk memastikan kegiatan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan maksimal. Keberhasilan pemungutan pajak hiburan sangat bergantung pada kecukupan dan kualitas sumber daya yang ada, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya yang mencukupi sangat berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan yang memadai dalam hal anggaran, tenaga kerja, fasilitas, teknologi, dan informasi, sebuah kebijakan yang sudah dirancang dengan baik tidak akan dapat dijalankan dengan efektif.

Tersedianya berbagai sumber daya yang mencakup anggaran, tenaga kerja, serta sarana dan prasarana menjadi penentu utama dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan. Tanpa anggaran yang cukup, banyak kegiatan operasional yang akan terkendala, seperti pelatihan, pengadaan alat, dan pemberian layanan kepada masyarakat. Kendala ini bisa menurunkan kualitas kebijakan yang telah dirancang, bahkan memperlambat proses implementasi. Anggaran yang memadai memungkinkan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola semua kebutuhan operasional yang berkaitan dengan kebijakan.

Selain anggaran, sumber daya manusia juga sangat penting. Tenaga pelaksana yang terampil, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, serta berdedikasi tinggi, diperlukan untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan sukses. Tanpa tenaga kerja yang cukup atau dengan kualitas yang rendah, kebijakan mungkin tidak dapat diterapkan secara optimal, bahkan meskipun sumber daya lain tersedia.

Adanya sarana dan prasarana yang mendukung, seperti kantor, alat kerja, dan infrastruktur teknologi, sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kendala dalam menyediakan fasilitas yang memadai sering kali berujung pada kelambatan, penurunan kualitas layanan, atau kesulitan dalam mencapai tujuan program.

Secara keseluruhan, pengelolaan dan alokasi sumber daya yang tepat sangat krusial dalam memastikan kesuksesan implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan efektif tanpa sumber daya yang memadai dan distribusi yang adil. Oleh karena itu, analisis kebutuhan sumber daya harus dilakukan sebelum pelaksanaan agar semua aspek dapat mendukung keberhasilan kebijakan.

a. Sarana dan Prasarana

Fasilitas, peralatan, dan infrastruktur pendukung lainnya memiliki peran vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kekurangan sarana dapat mempengaruhi pelaksanaan, baik dari sisi efektivitas maupun capaian.

Fasilitas fisik yang memadai, ruang kerja yang nyaman, dan perlengkapan yang sesuai, seperti komputer dan perangkat komunikasi, menjadi syarat untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas. Infrastruktur lain, seperti kendaraan operasional, diperlukan terutama untuk mobilitas pelaksanaan program, seperti dalam distribusi barang atau pelayanan ke daerah-daerah tertentu. Dalam contoh program vaksinasi massal, fasilitas seperti pusat kesehatan atau alat penyimpanan vaksin yang tepat sangat dibutuhkan.

Tanpa sarana yang cukup, implementasi program akan mengalami hambatan, mulai dari keterlambatan hingga penurunan kualitas layanan. Fasilitas yang kurang memadai mengharuskan pelaksana mencari cara alternatif yang mungkin kurang efisien, sehingga

mengurangi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana yang cukup dan tepat menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan observasi, sarana dan prasarana yang ada perlu ditingkatkan, misalnya dengan menambah kendaraan operasional untuk mendukung program Iwak Karing Batanak. Dengan demikian, implementasi kebijakan akan lebih lancar.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas, pengalaman, dan komitmen tenaga kerja sangat mempengaruhi suksesnya implementasi kebijakan. Selain keterampilan, jumlah tenaga kerja yang memadai juga menjadi faktor penentu apakah kebijakan dapat berjalan efektif.

Keahlian, pengetahuan, dan dedikasi tenaga kerja adalah elemen krusial dalam kelancaran implementasi kebijakan. Tenaga pelaksana yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya akan lebih mampu mengatasi tantangan selama proses implementasi. Pengalaman juga memberikan keuntungan tersendiri dalam pengambilan keputusan berdasarkan situasi nyata yang pernah dihadapi sebelumnya. Sedangkan dedikasi merupakan nilai penting karena kebijakan sering memerlukan komitmen dan usaha lebih dari para pelaksana.

Namun demikian, kompetensi dan dedikasi saja tidak cukup jika jumlah tenaga kerja tidak mencukupi. Ketika jumlah tenaga kerja terbatas, beban tugas bisa menjadi lebih berat, sehingga mengurangi kinerja dan meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam operasional.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, perlu adanya pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dengan tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi, program kebijakan bisa dilaksanakan dengan optimal.

Sebagaimana dinyatakan dalam teori Implementasi George C. Edwards III, indikator untuk sumber daya manusia sudah memadai, namun masih perlu peningkatan agar implementasi kebijakan lebih lancar dan terjaga.

c. Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang teralokasi dengan baik dan cukup, menjadi landasan bagi berbagai aktivitas kebijakan. Dari pengadaan fasilitas hingga pelaksanaan program di lapangan, keberadaan anggaran yang memadai memastikan pelaksanaan tidak terkendala kekurangan dana.

Penyediaan anggaran yang cukup memungkinkan semua kebutuhan operasional dapat dipenuhi tepat waktu, seperti pembelian perlengkapan, pelatihan, atau distribusi layanan kepada masyarakat. Tanpa perencanaan anggaran yang matang, kebijakan bisa jadi kurang efisien atau malah tidak efektif. Dalam berbagai kasus, alokasi anggaran yang salah bisa memicu pemborosan atau pengalokasian yang tidak sesuai dengan prioritas kebijakan.

Apabila anggaran tidak cukup, program kebijakan bisa tertunda atau bahkan berhenti. Kekurangan dana juga mengarah pada masalah-masalah operasional seperti kualitas pelayanan yang menurun atau penundaan pelaksanaan program.

Berdasarkan hal di atas, indikator anggaran sudah disediakan sebelum dimulainya program Iwak Karing Batanak, sesuai dengan prinsip Implementasi George C. Edwards III bahwa alokasi anggaran yang tepat dan memadai mendukung kelancaran implementasi kebijakan.

3. Sikap Birokrasi

Sikap birokrasi adalah faktor penentu dalam implementasi kebijakan karena mencerminkan dedikasi dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Sikap yang baik mendukung kelancaran implementasi kebijakan, sedangkan sikap negatif dapat menjadi penghalang.

Sikap birokrasi yang positif menunjukkan tingkat antusiasme dan tanggung jawab yang tinggi. Hal ini memotivasi pelaksana untuk bekerja keras, mencari solusi atas tantangan yang dihadapi, dan menjaga kualitas pelayanan meski dalam kondisi yang penuh keterbatasan sumber daya. Namun, sikap negatif seperti apatis, kemalasan, atau penolakan terhadap perubahan bisa

menghambat keberhasilan kebijakan. Jika pelaksana tidak peduli atau tidak berkomitmen, kebijakan dapat terhambat, menjadi tidak efektif, atau gagal mencapai tujuannya.

Sikap birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas kepemimpinan dan kondisi lingkungan kerja. Kepemimpinan yang baik dapat memotivasi pelaksana untuk menunjukkan sikap positif, sementara kebijakan birokrasi yang terlalu kaku atau kurangnya penghargaan dapat memicu sikap tidak peduli.

Dalam hal ini, sikap birokrasi dapat dipengaruhi oleh pendekatan holistik yang melibatkan pelatihan, penguatan motivasi, serta pengelolaan lingkungan kerja yang mendukung. Dengan demikian, sikap positif di birokrasi dapat memperlancar implementasi kebijakan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pedoman kerja yang jelas, seperti SOP, merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan. SOP memberikan panduan yang sistematis bagi pelaksana untuk melaksanakan tugas dengan efisien dan terstruktur. Tanpa pedoman yang jelas, kebijakan berisiko tidak konsisten, dan pelaksanaannya dapat terlambat atau bahkan gagal mencapai tujuan.

SOP membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan antar instansi dan memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pedoman yang jelas juga berfungsi untuk mengurangi kebingungan dan potensi kesalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan. Selain itu, SOP memudahkan evaluasi dan pengawasan karena memberikan acuan yang jelas untuk menilai apakah suatu kebijakan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Dengan desain yang tepat, SOP dapat menjamin keselarasan dalam semua proses dan pihak yang terlibat, serta memungkinkan penyesuaian dan pembaruan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kondisi di lapangan.

b. Ketersediaan Informasi

Akses terhadap informasi yang relevan dan up-to-date sangat penting dalam implementasi kebijakan yang berhasil. Informasi yang jelas membantu pelaksana membuat keputusan yang cepat dan tepat, mengurangi kesalahan, serta mempermudah koordinasi.

Ketiadaan atau kekurangan informasi sering menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Tanpa data yang akurat dan relevan, pelaksana kebijakan dapat menghadapi kesulitan dalam merencanakan tindakan yang tepat. Oleh karena itu, pengelolaan informasi yang baik adalah aspek utama dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Dengan adanya sistem teknologi yang memungkinkan akses informasi yang cepat dan tepat, pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif.

Selain itu, informasi yang mudah diakses dan lengkap juga mendukung evaluasi yang lebih baik, memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan perencanaan.

c. Kesediaan Menyelesaikan Tugas

Komitmen pegawai untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kesediaan ini menunjukkan dedikasi pegawai terhadap tujuan kebijakan, meskipun dihadapkan pada tantangan di lapangan.

Kesediaan pegawai untuk melaksanakan tugasnya terkait dengan pelaksanaan program Iwak Karing Batanak terbukti berjalan baik, karena pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksana yang bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan yang ada berkontribusi langsung pada efisiensi dan kelancaran program yang sedang dijalankan.

Indikator kesediaan untuk menyelesaikan tugas sudah tercermin dalam keberhasilan pelaksanaan program, karena setiap langkah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti pedoman yang sudah diatur dalam SK yang berlaku.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang jelas sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan dengan memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat. Hal ini mengurangi risiko kebingungan dan memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar unit. Struktur yang terorganisir memungkinkan setiap anggota organisasi memahami peran masing-masing, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Dengan pembagian kerja yang jelas, tidak ada overlapping atau kekosongan tanggung jawab, dan komunikasi antarunit dapat berjalan lancar. Selain itu, struktur yang jelas mempermudah evaluasi karena setiap bagian dapat dinilai berdasarkan indikator yang spesifik dan dapat dipantau secara berkala. Akuntabilitas pun dapat lebih terjamin, karena setiap individu bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dalam program. Dengan struktur organisasi yang terencana, seluruh proses implementasi kebijakan menjadi lebih efisien dan dapat berjalan sesuai harapan.

a. Jumlah Pegawai

Pentingnya jumlah pegawai yang tepat sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas. Tenaga kerja yang cukup menjamin distribusi tugas yang seimbang, sementara kekurangan pegawai bisa menyebabkan overload dan memengaruhi kualitas kerja. Jumlah pegawai yang ideal memastikan semua pekerjaan dapat ditangani tanpa memberikan beban berlebihan pada setiap individu. Jika kekurangan pegawai, beban kerja yang tidak proporsional dapat memperlambat proses atau menurunkan kualitas pekerjaan. Sebaliknya, kelebihan pegawai dengan peran yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakefisienan dan menurunkan motivasi. Organisasi harus menilai kebutuhan tenaga kerja secara periodik dan menyesuaikan jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja nyata. Pendekatan ini mendukung pembagian tugas yang terarah, mengurangi inefisiensi, dan mendukung tercapainya tujuan program.

Dalam pelaksanaan program Iwak Karing Batanak, terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas di tiap sekolah menjadi kendala. Hanya dua pegawai yang ditugaskan langsung ke sekolah, sementara pegawai lainnya terlibat dalam pekerjaan administrasi. Situasi ini memperburuk beban tugas yang harus dipikul, yang berisiko mengurangi kelancaran dan hasil dari program tersebut.

b. Unit Operasional

Unit operasional yang terstruktur dan berfungsi dengan baik sangat krusial untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Unit ini bertanggung jawab mengatur dan melaksanakan operasional program sehingga kebijakan dapat dijalankan sesuai rencana. Dalam pelaksanaan program Iwak Karing Batanak, terdapat dua unit operasional yang mengatur distribusi kegiatan, namun jumlah ini dirasa masih kurang untuk menjalankan program secara optimal. Sebagai dampaknya, pelaksanaan kegiatan hanya dapat dilaksanakan sebulan sekali, yang dirasa tidak cukup efektif. Oleh karena itu, penambahan unit operasional atau dukungan lebih dalam hal sumber daya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.

c. Jadwal Program

Penjadwalan yang jelas dan konsisten menjadi faktor penentu kesuksesan implementasi kebijakan. Dengan jadwal yang terorganisasi, setiap tahapan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kebijakan yang memiliki jadwal yang fleksibel atau tidak konsisten dapat menghambat pencapaian tujuan.

Program Iwak Karing Batanak yang hanya dilaksanakan sekali sebulan dirasa belum cukup efektif dalam meningkatkan literasi. Frekuensi kunjungan yang terlalu jarang, ditambah dengan terbatasnya operasional, membuat program ini kurang optimal. Agar mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan perbaikan dalam hal frekuensi kunjungan atau penambahan dukungan operasional yang ada.

Faktor yang Memepengaruhi Implementasi Program Iwak karing betanak (Introduksi Pustakawan Dan Tenaga Perpustakaan Berkeliling Menjadi Sahabat Anak) Di Kecamatan Awayan

Kabupaten Balangan (Studi Kasus Sdn Pulau Kembang Dan Sdn Putat Basiun)

1. Faktor Pendukung
   a. Sarana dan Prasarana
   b. Kerjasama Antar Sekolah
2. Faktor Penghambat
   a. Geografis/Lokasi yang Susah di Jangkau
   b. Cuaca Hujan
   c. Keterbatasan Pegawai
   d. Kurang Lengkapnya Koleksi Buku

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Program Iwak Karing Betanak (Introduksi Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan Berkeliling Menjadi Sahabat Anak) di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, khususnya pada SDN Pulau Kembang dan SDN Putat Basiun, hasil menunjukkan bahwa program ini telah diimplementasikan dengan cukup baik sesuai teori George C. Edwards III. Indikator implementasi yang berhasil mencakup komunikasi, koordinasi, kerjasama, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), kesediaan menyelesaikan tugas, jumlah pegawai, unit pelaksana, serta jadwal pelaksanaan yang terorganisir. Namun, indikator ketersediaan informasi masih memerlukan peningkatan agar mendukung program secara maksimal. Faktor pendukung keberhasilan program ini meliputi ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kerjasama antar sekolah yang terjalin dengan baik, sementara faktor penghambatnya antara lain kondisi geografis lokasi yang sulit dijangkau, cuaca buruk seperti hujan yang kerap mengganggu pelaksanaan, keterbatasan jumlah pegawai yang membuat beban kerja menjadi tinggi, serta kurang lengkapnya koleksi buku yang menjadi bahan literasi. Meski secara umum program ini sudah cukup baik, berbagai kendala tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan ketersediaan informasi, menambah jumlah pegawai, dan memperluas koleksi buku, agar tujuan program dalam meningkatkan literasi anak-anak di wilayah tersebut dapat tercapai secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Impelementasi dan Rvaluasi Kebijakan.* CV. Bintang Semesta Media. Yogyakarta.

Hasan, M., dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Tahta Media Group. Makassar

Indraastuti, Sri. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik*. Pekan Baru. Badan Penerbit Universitas Riau

Kusuma Dewi. 2022. *Kebijakan Publik.* Samudra Biru. Yogyakarta

Khaeruman dkk, 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Serang, CV. AA Rizky

Marwiyah, S. 2021. *Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi*.Bumi Aksara, Jakarta.

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'IYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210503.16.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.